



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KESEHATAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KESEHATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **TRISA WAHJUNI PUTRI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KESEHATAN**
3. NHK : **214278**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.230.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/40 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 216.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA CBR 150 R Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 348.400.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.112.076.132
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.906.976.132
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.906.976.132

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.